

## **BAB III**

### **Hubungan Uni Eropa dengan Turki**

Uni Eropa sebagai salah satu organisasi internasional selain menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga atau organisasi lain diluar Eropa, Uni Eropa juga memiliki hubungan dengan berbagai negara di dunia. Salah satu contoh hubungan Uni Eropa dengan negara lain adalah hubungan Uni Eropa dengan Turki. Hubungan antara Uni Eropa dengan Turki merupakan sebuah patner dimana hubungan mereka saling mempengaruhi satu sama lain terlebih lagi letak negara Turki yang langsung berbatasan dengan wilayah Eropa yang mempengaruhi dalam Politik, ekonomi serta sosial dan Budaya.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan hubungan Uni Eropa dengan Turki dengan melihat profil negara Turki, sejarah dan dinamika politik Turki, kerjasama dalam bidang perdagangan, Dinamika permohonan Turki menjadi anggota Uni Eropa.

#### **A. Profil Umum negara Turki**

Turki merupakan sebuah negara yang wilayahnya terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan Eropa. Turki memiliki luas wilayah sekitar 814.578 km<sup>2</sup> dengan pembagian 97% berada di wilayah benua Asia dan sisanya di benua Eropa. Secara geografis, negara ini berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara, Bulgaria sebelah barat laut, Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat, Georgia di timur laut, di sebelah timur berbatasan dengan Armenia, Azerjiban, dan Iran, di tenggara berbatasan dengan Irak dan Suriah, dan Laut Mediterania berada di sebelah selatan. Letak geografisnya yang strategis ini

menjadikan Turki sebagai jembatan antara kebudayaan Timur dan Barat (Rizki, 2014).

Turki memiliki 81 Provinsi dengan Ankara sebagai ibukota dari Turki. Namun, Istanbul tidak dapat dipisahkan dari negara ini karena memiliki arti penting tersendiri bagi Turki. Turki memiliki jumlah penduduk mencapai 78 juta Jiwa dengan mayoritas penduduknya 99,8% beragama Islam Sunni dengan sisanya beragama Kristen dan Yahudi. Turki menjalankan sistem Republik Konstitusional yang demokratis, sekular, dan bersatu. Sistem politiknya didirikan pada tahun 1923 di bawah pimpinan Mustafa Kemal Ataturk setelah kejatuhan Khilafah Ottoman, akibat Perang Dunia I. Sejak itu, Turki telah berangsur-angsur bergabung dengan Barat sementara di saat yang sama menjalin hubungan dengan dunia Timur.

Turki merupakan salah satu anggota pendiri Persatuan Bangsa-Bangsa, Organisasi Konferensi Islam (OKI), OECD, dan OSCE, serta negara anggota Dewan Eropa sejak tahun 1949, dan NATO sejak tahun 1952.

## **B. Sejarah dan Dinamika Politik Turki**

Turki memiliki sejarah Peradaban yang sangat lengkap. Turki pernah diduduki oleh beberapa kerajaan terkenal, seperti Kerajaan Romawi Timur atau yang biasa disebut dengan Bizantium pada tahun 395-1453 M, Dinasti Seljuk pada tahun 1071-1300 M dan Dinasti Ottoman pada tahun 1300-1922 M.

Sejarah Turki dapat dilihat dengan membaginya menjadi 3 periode yang dimulai dengan periode Pra- Islam ketika kekaisaran Romawi Timur hingga

Periode Revolusi ketika dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk (Murwati, 2009).

**a. Periode Pra-Islam**

Turki diduduki oleh kerajaan Romawi dimulai pada abad 395 M dengan menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota Turki. Konstantinopel menjadi berkembang pesat pada kekuasaan Romawi dalam sektor Perdagangan dan kebudayaan. Selain itu penyebaran agama Kristen pun juga meningkat pada kekuasaan Romawi Timur. Namun pada pertengahan abad ke-13, kerajaan Bizantium mulai melemah dikarenakan telah kehilangan beberapa kekuasaannya oleh beberapa kabilah. Salah satu kabilah ini berada di daerah Eskisehir yang merupakan wilayah bagian barat Anatolia, yang dipimpin oleh Osman I, anak dari Ertugrul dan kemudian mendirikan kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1299. Akhir dari kekuasaan kerajaan Romawi Timur atau Bizantium dengan direbutnya Konstantinopel oleh Turki Ottoman pada tahun 1453.

**b. Periode Islam**

Dinasti Seljuk dan Dinasti Ottoman merupakan penanda dimulainya periode Islam di Turki. Dinasti Seljuk berkuasa dimulai tahun 1071-1300 M sedangkan Dinasti Utsmani atau dinasti Ottoman dimulai pada tahun 1300-1922 M yang didirikan oleh Bani Utsman. Kekaisaran Utsmani berkuasa selama kurang lebih enam abad. Awal keemasan periode Dinasti Ottoman ketika pasukan Turki ottoman berhasil menaklukan

ibukota Bizzantium yaitu kota Konstantinopel pada tahun 1453. Dengan ditaklukkannya ibukota Bizantium membuat kekaisaran Turki Ottoman menjadi kekuatan besar di wilayah Eropa Tenggara dan Mediterania Timur. Pada masa kejayaannya wilayah kekuasaan Dinasti Utmaniyah meliputi kawasan Jazirah Arab, Balkan, Hongaria hingga kawasan Afrika Utara.

Pada kekaisaran Utmaniyah sultan yang memimpin pertama kali adalah Sultan Usman I. Pada pemeritahan Usman I bentuk pemerintahannya adalah formal Utmaniyah dengan mengembangkan sistem yang dikenal dengan Millet yang artinya kelompok agama dan suku minoritas dapat mengurus masalah mereka sendiri tanpa intervensi dan kontrol dari pemerintah pusat. Sultan Usman I terus memperluas kekuasaan sampai perbatasan wilayah kerajaan Bizantium dan memindahkan ibukota kesultanan ke Kota Bursa. Setelah sepeninggalan Sultan Usman I dilanjutkan oleh Sultan Selim I dan Suleiman I. Pada Periode ini Turki berhasil memperluas wilayahnya sampai Benua Eropa dan Afrika Utara dan berhasil menjadi kekuatan dagang yang kuat di jalur perdagangan antara Eropa dan Asia berkat kemampuan angkatan laut Utmaniyah. Pada tahun 1566 setelah sepeninggalan Sultan Suleiman wilayah kekuasaan Utmaniyah menghilang seiring dengan kebangkitan kerajaan-kerajaan Eropa di wilayah Barat. Puncak berakhirnya Dinasti Utmani adalah dengan kekalahannya di Perang Dunia I. Selanjutnya Turki mengalami masa transisi dari Periode Islam menjadi Periode Revolusi Modern. Transisi ini

dapat dilihat dari bentuk pemerintahan yang semula dipimpin oleh Sultan menjadi pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Presiden.

**c. Periode Modern**

Keruntuhan Kekaisaran Turki Utsmani pada Perang Dunia I menjadi awal dimulainya periode Modern pada tahun 1923 M. Pada Periode Revolusi ini Turki dipimpin oleh seorang presiden yang pertama kali setelah sebelumnya dipimpin oleh seorang Sultan yang dikenal dengan Mustafa Kamal Attaturk. Pada masa pemerintahannya Mustafa Kamal Attaturk mengampanyekan akan memberikan arah dan Tujuan bagi generasi baru negara untuk mengubah masyarakat Turki menuju aspek kehidupan abad ke-20 yang kontemporer dan memulai reformasi yang drastis di semua aspek.

Sebelum menjadi presiden Turki pertama kalinya sepak terjang Mustafa Kamal adalah membentuk Dewan Perwakilan Nasional dan beliau menobatkan dirinya untuk menjadi ketuanya. Dewan Perwakilan Nasional mengusulkan konsep yang memisahkan antara khilafah dengan Pemerintahan. Sehingga pada masa itu ada dua pemerintahan yaitu pemerintahan Khalifah di Istanbul dan Pemerintah Dewan Perwakilan Nasional di Ankara. Setelah memuncaknya krisis, Dewan Perwakilan Nasional mengusulkan Mustafa Kamal Attaturk untuk menjadi ketua parlemen dan diharapkan dapat menyelesaikan kondisi krisis yang terjadi di Turki saat itu. Kemudian setelah resmi menjadi ketua parlemen, Mustafa

kamal mengumumkan kebijakannya, yaitu mengubah sistem khilafah menjadi Republik yang dipimpin oleh Presiden yang dipilih oleh parlemen.

Mustafa Kamal Attaturk menganggap bahwa khalifah pada masa itu dianggap sebagai sekutu asing yang harus di lenyapkan. Tepat tanggal 3 Maret 1924 M, Mustafa Kamal memecat Khalifah, membubarkan sistem khalifah dan menghapuskan sistem Islam dari Turki pada sidang Dewan Perwakilan Nasional. Pada masa Pemerintahanya Mustafa Kamal melakukan modernisasi besar-besaran dengan berkiplat ke Barat. Kedekatan antara Turki dan Barat semakin kental pada masa setelah Perang Dunia II. Hal ini dapat dilihat dari kedekatan Turki dengan Amerika dengan mengundang Amerika Serikat untuk mendirikan pangkalan perang militer di wilayahnya dan menolak permintaan Uni Soviet untuk membangun pangkalan militer.

Dalam sistem politik Turki dapat dipahami dengan membedakannya menjadi 3 bagian yaitu Politik Turki lama, Transisi, dan Turki modern. Sistem Politik Turki lama dikenal pada masa kepemimpinan Mustafa Kamal Attaturk pada tahun 1923. Dalam sistem politik Turki lama ini dapat disebut juga dengan sistem politik Turki masa Kemalis. Pada Masa ini hanya ada satu partai yaitu Partai Rakyat Republik (PRR) dan partai ini telah memonopoli kekuasaan pada Kongres partai tahun 1931. Pada masa ini Mustafa Kamal Attaturk sebagai pemimpin Turki mengadakan reformasi besar-besaran dalam tatanan kehidupan untuk menjadikan Turki menjadi negara sekuler Modern. Pada Sistem ini membatasi peran agama dengan menjadikan agama sebagai kepercayaan pribadi

yang terpisah dari ruang Publik. Ideologi ini diimplikasikan dengan rangkaian kebijakan dalam rentan waktu dari tahun 1922-1935. Sebagai contoh adalah kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 1924 dimana Mustafa kamal Attaturk melakukan penghapusan sistem kekhalfahan, Penutupan sekolah Islam tradisional, dan pembubaran pengadilan agama. Dan masih banyak lagi kebijakan yang menyangkut tentang Islam yang dilarang pada masa itu.

Dalam sistem ini kekuasaan negara didesain untuk dapat mengontrol agama tidak sekedar memasukan agama kedalam ranah pribadi namun juga menyingkirkan agama dari ruang publik. Langkah yang dilakukan Mustafa Kamal adalah dengan mengontrol ulama dan terikat Sufi melalui beberapa cara. Misalnya, Attaturk menetapkan undang-undang mengenai penyatuan sistem pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Aturan itu menjadi landasan hukum bagi penutupan seluruh madrasah dan pelimpahan seluruh urusan pendidikan pada kekuasaan kementerian pendidikan.

Setelah sepeninggalan Mustafa Kamal Attaturk, Turki mengalami masa transisi politik yang dikenala dengan sistem politik transisi. Pada masa ini Turki mulai membangun sistem demokrasi yang dapat mewakili aspirasi rakyat. Kemudian dalam sistem kepartaian mulai menggunakan sistem multipartai yang mana sebelumnya menggunakan sistem partai tunggal. Secara garis besar, struktur politik Turki mengikuti tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif Turki memiliki struktur ganda yaitu presiden Republik Turki dan Dewan Menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. Periode multi partai di Turki bermula pada Juli 1945

ketika seorang industrialis terkemuka di Istanbul, Nuri Demirag, mendirikan partai oposisi *Milli Kalkinma Partisi* (Partai Pembangunan Nasional) yang secara resmi terdaftar pada 5 September 1945. Terdapat partai lain yang tumbuh di Turki yaitu *Demokrat Parti* (Partai Demokrat). Partai Demokrat secara resmi terdaftar pada 7 Januari 1946.

Setelah Sistem Politik Transisi dilanjutkan dengan Sistem Politik Modern. Pada saat kudeta tahun 1980, militer merencanakan pemerintah Turki kedalam sistem politik demokratis. Militer mengumumkan bahwa parlemen dan kabinet telah dibubarkan dan bahwa imunitas para anggota majelis nasional (parlemen) telah diakhiri. Majelis yang beranggotakan 160 orang mengadakan pertemuan pada tanggal 23 Oktober 1981. Anggota majelis diketuai oleh Profesor Orhan Aldikacti.

Dihasilkan sebuah draf yang menjelaskan bahwa pusat kekuasaan di tangan eksekutif dan menambah kekuasaan presiden serta dewan keamanan nasional. Pada tahun 1980 an partai Islam mulai berkembang di Turki dan Turki mengarah pada sistem politik yang demokratis. Dari sudut pandang struktural, sistem politik demokrasi secara ideal ialah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus.



### **C. Kerjasama Uni Eropa dengan Turki dalam bidang Perdagangan**

Turki merupakan negara yang sangat strategis yang menjadi salah satu gerbang dari Uni Eropa. Selain menjadi pintu gerbang Uni Eropa Turki juga merupakan pintu gerbang dari negara Timur-Tengah dan memiliki hubungan baik karena ikatan ideologi yang sama. Namun setelah terjadi perubahan sistem pemerintahan Turki mulai mengamsumsi barat sehingga Turki mulai berbenah diri agar bisa diterima dan mengadakan kerjasama dengan negara-negara Uni Eropa karena Turki menganggap Uni Eropa maju dalam hal perekonomiannya dan dapat membawa dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi Turki.

Hubungan Uni Eropa dengan Turki berawal dari kerjasama dalam bidang perdagangan yang dikenal dengan *Ankara Agreement* pada tahun 1959. Pada tahun 1996 Uni Eropa memberikan *Customs Union* kepada Turki hal ini menandai bahwa kedudukan Turki menjadi lebih tinggi daripada integrasi ekonomi dan pada tahun 1999 Dewan Eropa memberikan status negara kandidat untuk Turki. Saat ini Turki masih menjadi kandidat anggota Uni Eropa sejak dibuka pada 2005 karena Turki memiliki tantangan dalam menjadi anggota Uni Eropa. Ruang lingkup dalam pabean antara Uni Eropa dengan Turki meliputi perdagangan produk manufaktur antara Turki dan Uni Eropa, dan juga memerlukan penyelarasan oleh Turki dengan kebijakan Uni Eropa, seperti peraturan teknis produk, kompetisi, dan Hukum Kekayaan Intelektual. Perdagangan antara Uni Eropa dan Turki di bidang pertanian dan produk baja khusus diatur oleh perjanjian yang terpisah. Dari kerjasama tersebut secara signifikan telah meningkatkan volume perdagangan antara Turki dan negara-

negara anggota Uni Eropa. Saat ini, lebih dari separuh perdagangan Turki berasal dari Uni Eropa.

Pangsa ekspor ke Uni Eropa sedikit meningkat dari 56,0% di tahun 2006 menjadi 56,4% pada tahun 2007. Impor dari Uni Eropa sebagai bagian dari total impor menurun, dari 42,6% menjadi 40,4%, terutama disebabkan oleh meningkatnya impor tagihan untuk Energy, yang hampir secara eksklusif Turki diimpor dari negara-negara non-Uni Eropa. Industri impor utama Turki dari Uni Eropa adalah mesin, produk otomotif, bahan kimia, besi dan baja. Dan impor utama pertanian dari Uni Eropa adalah sereal. Sedangkan impor Uni Eropa dari Turki adalah tekstil dan kain, mesin, dan peralatan transportasi.

Investasi langsung asing (FDI) Uni Eropa di Turki telah mencapai hampir € 9 miliar di tahun 2007. Mereka melayani sekitar dua pertiga dari total aliran FDI di Turki dan jumlah mereka menjadi 3,5% dari PDB Turki. Namun, pada kuartal pertama 2008, pangsa FDI mengalir dari Uni Eropa jatuh lebih jauh sampai 53% (Wardana, 2015).

## **D. Dinamika permohonan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa**

### **a. Permohonan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa**

Kerjasama Uni Eropa dengan Turki dimulai pada tahun 1987 dimana Turki mengajukan permohonan kepada Uni Eropa untuk menjadi anggota dalam European Economic Community (ECC) . Permohonan Turki untuk menjadi anggota dalam European Economic Community diwujudkan pada *Ankara Agreement* yang ditandatangani pada 12 September 1963. Dengan ditandatangani perjanjian tersebut berarti Turki dapat melakukan perdagangan barang dan produk-produk pertanian dengan anggota ECC tanpa pembatasan (Delegation of the European Union to Turkey, 2017).

Pada tahun 1996 Turki masuk dalam European Union Customs Union menandakan kedudukan Turki menjadi lebih tinggi daripada integrasi ekonomi dan Turki memiliki prospek dan berpeluang untuk menjadi anggota Uni Eropa. Namun untuk menjadi anggota Uni Eropa bukanlah sesuatu yang mudah Dewan Uni Eropa meminta Turki untuk memenuhi kriteria politik Kopenhagen. Adapun kriteria kopenhagen berisi 35 bab aturan yang harus dipenuhi oleh suatu negara apabila negara tersebut menginginkan untuk menjadi anggota Uni Eropa. Dalam Kopenhagen ini mengharuskan negara memiliki lembaga untuk mempertahankan pemerintahan yang demokratis dan hak asasi manusia, memiliki mekanisme ekonomi pasar, dan mematuhi kewajiban dan tujuan dari Uni Eropa. Uni Eropa meminta Turki untuk menyelesaikan masalah yang ada di Cyprus. Sebagai gantinya komisi diberi mandat untuk memantau kemajuan

kinerja domestik Turki juga menyusun dokumen akses kemitraan bagi Turki dan Uni Eropa juga menaikkan bantuan keuangan ke Turki (Tocci, 2014, p. 2).

Turki mulai menyesuaikan dengan Konpenhagen sejak tahun 2002 yang dikenal dengan *Turki Harmonization Packages*. Proses penyesuaian diri yang pertama ditandai dengan adopsi hukum anti terorisme dalam hukum kriminalitas di Turki. Ini menunjukkan upaya Turki untuk turut memerangi terorisme, sebagai musuh bersama Uni Eropa. Kemudian Turki menjalankan paket harmonisasi ketiga yang mana menghapus hukuman mati di dalam undang-undang Turki, memperbolehkan pemberitaan dan proses pendidikan menggunakan bahasa ibu, termasuk didalamnya bahasa Kurdi. Serta memperbolehkan kepemilikan properti oleh kaum minoritas (Cagatay, 2013).

Turki terus berupaya untuk memenuhi kriteria Kopenhagen secara luas akhirnya pada tahun 2004 Komisi Eropa mengeluarkan keputusan bahwa negosiasi mengenai akses Turki untuk segera dilaksanakan. Namun pada tahun 2005 proses Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa terhambat hingga sampai saat ini karena kasus Cyprus pernyataan ini dikeluarkan oleh Komisi Uni Eropa. Masalah Cyprus memang telah menjadi masalah dalam negeri Turki sejak tahun 1960-an. Hal ini yang membuat proses negosiasi Turki menjadi terhambat. Hingga kini upaya dari Turki untuk diterima menjadi anggota Uni Eropa masih dalam tahap lobbying (Parker, 2014).

## **b. Langkah-langkah Turki untuk dapat bergabung di Uni Eropa**

Dalam persyaratan suatu negara berkeinginan untuk bergabung ke dalam Uni Eropa ada beberapa standar persyaratan dan peraturan untuk dapat diterima menjadi anggota tetap Uni Eropa. Di dalam Uni Eropa negara calon anggota tetap Uni Eropa harus menjalankan proses aksesori negosiasi yang terdiri dari 130.000 halaman yang dikelompokkan dalam 35 bidang kebijakan yang berbeda agar menjadi anggota tetap Uni Eropa (European Commission-Enlargement Policy, 2017).

Negosiasi keanggotaan Turki untuk menjadi anggota tetap Uni Eropa dimulai pada tahun 2005. Pada negosiasi Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa bab yang pertama dinegosiasikan adalah Bab ke 25 yang berisi tentang ilmu pengetahuan dan penelitian. Pada November 2006 Bab 25 ditutup untuk sementara waktu dikarenakan kebijakan Turki dalam pembatasan pergerakan barang, termasuk pembatasan sarana transportasi yang tidak sesuai dengan *Additional Protocol* yang telah ditandatangani oleh Turki dalam *Ankara Agreement* . Akhirnya pada Desember 2006 Dewan Eropa memutuskan untuk menunda negosiasi delapan bab, Bab tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Chapter 1 (*Free Movement of goods*)
2. Chapter 3 (*Right of establishment and freedom to provide services*)
3. Chapter 9 (*Financial Services*)
4. Chapter 11 (*Agriculture and rural development*)
5. Chapter 13 (*Fisheries*)

6. Chapter 14 (*Transport policy*)
7. Chapter 29 (*Customs Union*)
8. Chapter 30 (*External relations*)

Proses negosiasi Turki untuk menjadi anggota tetap Uni Eropa tidak berarti dibatalkan dengan keputusan yang keluar pada Desember 2006 namun negosiasi tersebut kembali berjalan pada Januari tahun 2007. Pada tahun 2007 ada lima bab yang kembali di buka untuk dinegosiasikan, antara lain:

1. Chapter 20 (*Enterprise and Industrial policy*)
2. Chapter 18 (*Statistic*)
3. Chapter 32 (*Financial Control*)
4. Chapter 21 (*Trans-European network*)
5. Chapter 28 (*Consumer and health protection*)

Kemudian dilanjutkan empat bab untuk dibuka pada tahun 2008, antara lain:

1. Chapter 6 (*Company law*)
2. Chapter 7 (*Intellectual property right*)
3. Chapter 4 (*Free movement of capital*)
4. Chapter 10 (*Information Society and media*)

Selanjutnya pembukaan bab-bab untuk dinegosiasikan antara lain:

1. Chapter 16 (*Taxation*) dan Chapter 27 (*Environment*) pada tahun 2009
2. Chapter 12 (*Food safety, veterinary and phytosanitary policy*) pada tahun 2010

3. Chapter 22 (*Regional policy and coordination of structural instrument*) pada Tahun 2013

Pembukaan bab baru terus dilakukan Turki untuk memenuhi syarat-syarat untuk menjadi anggota tetap di Uni Eropa dengan jalur negosiasi. Hingga Akhirnya pada Desember 2015, 28 negara anggota Uni Eropa yang di wakili oleh Menteri Luar Negeri menyetujui untuk pembukaan bab baru yang berfokus tentang kebijakan ekonomi dan moneter.

Pada tanggal 30 Juni 2016, diadakan pertemuan konferensi aksesori yang kedua belas dengan Turki pada tingkat menteri di Brussels. Konferensi tersebut membahas tentang pembukaan bab 33 tentang ketentuan keuangan dan anggaran. Bab ini mengatur tentang mengenai sumber keuangan yang diperlukan untuk pendanaan anggaran Uni Eropa. Sampai saat ini Turki telah menyelesaikan 16 bab negosiasi dari 35 bab negosiasi.